

DAFTAR PUSTAKA

- Almalki, S. (2016). Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed Methods Research--Challenges and Benefits. *Journal of Education and Learning*, 5(3), 288–296.
- Andini, I. Y., & Arfiyanto, D. (2020). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(1), 63–76. <https://doi.org/10.24929/feb.v10i1.972>
- Anwar, M. (2020). *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen* (Cetakan 1). Penerbit Kencana.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi VI). PT Rineka Cipta.
- Azwar, R. C. (2017). Partai Politik ditengah Ancaman “Virus” Oligarki dan Politik Kartel. *Jurnal Ketatanegaraan*, 005.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (S. Saat (ed.); Edisi 3). Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2020). *Manajemen Keuangan Publik*. Penerbit Andi.
- Dahlia, Nurhidayah, & Listiawati, N. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Sebatik*, 23(2), 292–300.
- Domai, T. (2010). *Manajemen Keuangan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Efferin, S. (2008). Teori Institusional Terkini dan Sistem Pengendalian Manajemen Beberapa Agenda Untuk Pengembangan Kerangka Teoritis. In *Akuntansi dan Teknologi Informasi: Vol. 7 (2)* (Issues 1412–5994, pp. 63–75).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan , dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Edisi 2, C). Penerbit Salemba Empat.
- Hamid, K. T. (2013). Good governance and new public sector financial management reform: A panacea, or placebo for transparency and accountability. *A Paper Presented at the Executive Mandatory Professional Training Programme for Fellows of the Chartered Institute of Finance and Control of Nigeria (CIFCN), Abuja, Nigeria*.
- Hessels, J., & Terjesen, S. (2008). SME choice of direct and indirect export modes:

Resource dependency and institutional theory perspectives. *Zooetermer: SCALES*.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, (2015).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (2011).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (2012).

Karhi, N. S. (1997). Beberapa Catatan Tentang Good Governance. *Jurnal Administrasi Dan Pembangunan*, 1(2).

Legislatif, T. P. K. P. (2013). *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*. 123. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/03/20140421090141.Pembiayaan-partai-politik.pdf>

Malia, E. (2021). Penerapan Good Political Governance Sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(1), 43–54. <https://doi.org/10.24929/feb.v11i1.1319>

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.

Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(Desember), 276–292. www.jchunmer.wordpress.com

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai , (2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (2018).

Rakhmat. (2018). *Adiministrasi dan Akuntabilitas Publik* (A. Pramesta (ed.)). Penerbit Andi.

Ratnasari, S., Syahril, A., & Syam, A. (2022). Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kota Pekanbaru

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. *Eksekusi*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.14388>
- Satriawan, H. A. (2022). Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terkait Kewenangan Uji Materil oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 54–66.
- Setyaningsih, T., Asrihapsari, A., & Setiawan, D. (2019). Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Di Surakarta, Sudahkah Transparan Dan Akuntabel? *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 157–168. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.186>
- Shaikh, A., & Naeem, N. (2013). *An Introduction to Public Financial Management*. http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/pk/mem/Members_network_panel_2013.pdf
- Simanjuntak, D. A. (2016). Fenomenologi Laporan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Banten. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 13(1), 19–36.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p037>
- Tjokroamidjojo, B. (2000). Good governance, New Paradigm of Development Management. *Journal of Development Management*, 30, 20–31.
- Tosika, M., Fahmi, K., & Asrinaldi. (2020). Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, V(1), 39–56. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Wibowo, E. A. (2018). Akuntabilitas Partai Politik Dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Propinsi DIY Tahun 2014. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.297>
- Wibowo, R. S., Dyasanti, V., Setiono, T., Alam, A. N., Badoh, I. F. Z., Sunaryo, T., & Kartiningtyas, E. (n.d.). “*Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*” Sebuah Modul Pelatihan. Transparency Intenational Indonesia. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK>